



## The Political Policies Related to Islamic Education

Sutrisno \*<sup>1</sup>, Lukman Asha <sup>2</sup>, Fakhruddin <sup>3</sup>

\* <sup>1</sup>[Sutrisno.mhs24@iain.ac.id](mailto:Sutrisno.mhs24@iain.ac.id), <sup>2</sup>[asha.lukman@gmail.com](mailto:asha.lukman@gmail.com), <sup>3</sup>[fakhruddin@iaincurup.ac.id](mailto:fakhruddin@iaincurup.ac.id)

<sup>1,2,3</sup> Manajemen Pendidikan Islam, IAIN Curup, Curup, Indonesia

### ABSTRACT

This study employs the Systematic Literature Review (SLR) method to examine the influence of political policies on Islamic education in Indonesia. By collecting data from various journals, books, and relevant sources published in the last five years, the study finds that the relationship between political power and Islamic education is both strong and dynamic. Historically, Islamic education has often served as a tool for reinforcing authority, as well as a means of shaping national character. In the context of modern politics, especially during the reform era, Islamic education has been strengthened through policies such as educational decentralization, recognition of the status of madrasahs, integration of general and religious curricula, and financial support. However, challenges such as globalization, technological advancement, democratization, and moral decline remain serious threats that must be anticipated. Therefore, Islamic education must be adaptive and strategic to actively contribute to the development of a religious and morally grounded national civilization. This study emphasizes that Islamic education holds a strategic position within the national education system and must be continuously reinforced in response to global political and social dynamics.

**Keywords: Political Policy; Islamic Education**

### PENDAHULUAN

Sejarah pendidikan Islam di Indonesia sedikit banyak di pengaruhi oleh latar belakang sosial politik, apalagi ketika zaman penjajahan Belanda, yang merupakan penjajah paling lama bertahan di Indonesia, hal ini menyebabkan kerusakan tatanan keislaman yang sudah ada di Indonesia saat itu, karena kaum kolonial belanda mempunyai misi yang ganda diantaranya Imperialis (Bangsa yang menjalankan politik menjajah Bangsa lain) dan kristenisasi. (Yudi Agung Franata, Andi Zainal Abidin, Kasful Anwar US, 2024).

Hegemoni kolonialisme yang ada di dunia Muslim, termasuk Indonesia, telah melahirkan berbagai persoalan yang cukup kompleks. Karena selain adanya pengekangan terhadap aktivitas ritual-keberagamaan, pendidikan juga menjadi target Kolonial untuk dibekukan. Akan tetapi, di Indonesia proses ini justru tidak bisa dilakukan oleh para Kolonial, karena dominasi kaum intelektual Muslim Indonesia yang “tidak rela” dengan kehadiran Kolonialisme di Indonesia. Kaum intelektual Muslim Indonesia pada saat itu, mencoba membentuk organisasi-organisasi Islam sebagai media penyadaran umat Islam. Yang menjadi menarik pada masa ini adalah adanya perbedaan semangat perjuangan antara satu organisasi dengan organisasi Islam lainnya, sehingga membentuk sebuah “watak” atau model yang berbeda pula dalam melakukan penyadaran umat Islam tersebut. (Yudi Agung Franata, Andi Zainal Abidin, Kasful Anwar US, 2024).

Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang mempunyai peran yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Pelaksanaan Pendidikan Islam di Perguruan Agama Islam dilakukan di madrasah, baik negeri maupun swasta, mulai jenjang MI hingga PTAI. Secara historis, eksistensi madrasah di Indonesia ada sejak awal abad XX, atau paling cepat pada akhir abad XIX, berbarengan dengan munculnya ormas Islam, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Hal ini dilatarbelakangi oleh penolakan usulan agar pelajaran agama Islam dimasukkan sebagai mata pelajaran di perguruan umum oleh Belanda hingga diberlakukannya ordonasi *indische staatsregeling* pasal 179 ayat 2 yang menyatakan bahwa „pengajaran umum adalah netral“. Selain itu, juga karena adanya tuntutan pembaruan pendidikan Islam secara internal, baik dari segi metode maupun isi atau materi pelajaran. (Maemunah, Eni suhaeni, 2022).

Hubungan antara pendidikan dan politik saling terkait karena pendidikan berperan besar dalam integrasi sistem politik. Apabila pendidikan tidak sanggup berperan menjalankan fungsi integratifnya akan muncul tekanan dan hambatan yang harus dihadapi oleh sistem politik. Oleh karena itu, harus diberikan ruang gerak dalam membangun pendidikan yang stabil, demi tercapai tujuan Pendidikan Sehingga pendidikan mampu berdikari dan mempunyai andil yang besar dalam membangun kemajuan bangsa dan Negara dan bebas dari tekanan sistem politik. (Asriani, 2024).

Kondisi lembaga pendidikan Islam di Indonesia masih ditandai oleh berbagai kelemahan, antara lain: (1) Kelemahan sumber daya manusia (SDM), manajemen, dan dana. Sementara itu diketahui bahwa jika suatu lembaga pendidikan ingin tetap eksis secara fungsional di tengah-tengah arus kehidupan yang semakin kompetitif seperti sekarang ini, harus didukung oleh ketiga hal tersebut, yaitu sumber daya manusia, manajemen, dan dana; (2) Lembaga pendidikan tinggi Islam masih belum mampu mengupayakan secara optimal mewujudkan Islam sesuai dengan cita-cita idealnya. Di sisi lain, masyarakat masih memosisikan lembaga pendidikan Islam sebagai pilar utama yang menyangga kelangsungan Islam dalam mewujudkan cita-citanya, yaitu memberi rahmat bagi seluruh alam; (3) Lembaga pendidikan tinggi Islam masih dipandang belum mampu mewujudkan Islam secara transformatif. Kenyataan bahwa masyarakat Islam dalam mengamalkan ajaran agamanya telah berhenti pada tataran simbol dan formalistik; (4) Kecenderungan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat madani yang kuat, yaitu masyarakat yang menunjang tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti nilai-nilai keadilan, kebersamaan, kesederajatan, kemitraan, kejujuran dan sebagainya, dan (5) Lembaga pendidikan tinggi Islam, bahkan juga pada lembaga Pendidikan. (Ahdar dan Musyarif, 2022).

Kelemahan tersebut menjadi persoalan penting yang harus dibenahi oleh lembaga pendidikan Islam. Perbaikan demi kemajuan tersebut sangat diharapkan untuk keberlangsungan lembaga pendidikan Islam di era saat ini terutama dengan adanya kebijakan tentang pengakuan lembaga pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Sehingga dari sinilah muncul tokoh-tokoh muslim intelektual yang mempunyai peranan dalam memperbaharui sistem pendidikan melalui kebijakan-kebijakan politik yang ada di pemerintahan. Dari uraian tersebut, maka dalam makalah ini akan dipaparkan dampak kebijakan politik terhadap Pendidikan Islam, tantangan dan peluang Pendidikan Islam dalam dinamika kebijakan politik (Frimayanti, 2022).

## METODE PENELITIAN

Penulisan makalah ini menggunakan metode mengumpulkan bahan dan materi berbagai jurnal, buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan pengorganisasian dan kepemimpinan Pendidikan. Metode literatur yang berhubungan dengan topik yang diminati

dan dapat membantu mempermudah dalam merumuskan masalah penelitian, metode ini disebut dengan metode SLR (Systematic literature review). Setelah bahan dikumpulkan kemudian diteliti.

Metode literatur bertujuan untuk membantu menemukan wawasan, kebenaran, dan juga penyelesaian dari masalah yang dihadapi. Sebagai petunjuk yang terbukti kebenarannya sebaiknya menggunakan jurnal lima tahun terakhir.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dampak kebijakan politik terhadap Pendidikan Islam di Indonesia

Hubungan antara kekuasaan dan pendidikan memiliki berbagai makna. Istilah "politik" bisa diartikan sebagai pengetahuan tentang urusan negara, tindakan kebijakan, strategi pemerintahan, atau bahkan ilmu untuk mencapai kekuasaan. Kekuasaan, dari segi etimologi, merujuk pada kemampuan atau wewenang untuk mengendalikan, mengatur, dan mempengaruhi suatu hal, sedangkan dari segi terminologi, kekuasaan mengacu pada kewenangan seseorang atau kelompok untuk memerintah, mengatur, dan memengaruhi sesuatu. (Nadia Nurindah, 2024).

Hubungan antara kekuasaan dan pendidikan memiliki berbagai makna. Istilah "politik" bisa diartikan sebagai pengetahuan tentang urusan negara, tindakan kebijakan, strategi pemerintahan, atau bahkan ilmu untuk mencapai kekuasaan. Kekuasaan, dari segi etimologi, merujuk pada kemampuan atau wewenang untuk mengendalikan, mengatur, dan mempengaruhi suatu hal, sedangkan dari segi terminologi, kekuasaan mengacu pada kewenangan seseorang atau kelompok untuk memerintah, mengatur, dan memengaruhi sesuatu. Rohman, dalam karyanya, menjelaskan bahwa negara memiliki kekuasaan politik untuk memaksa masyarakat secara sah dalam rangka mengatur dan memerintah. Kekuasaan politik membutuhkan dukungan dari berbagai sumber, termasuk sarana paksaan seperti senjata, penjara, teknologi, dan pendidikan. Pendidikan bisa menjadi alat untuk memperkuat kekuasaan politik, dan ini mencerminkan bagaimana pendidikan Islam dalam dunia pendidikan memiliki keterkaitan yang kuat dengan kekuasaan politik. (Ahdar dan Musyarif, 2022).

Sirozi mengklarifikasi bahwa hubungan antara politik, kekuasaan, dan Pendidikan dapat bervariasi tergantung pada karakteristik sosial politik masyarakat di mana hubungan tersebut berlangsung. Bentuk hubungan ini dapat sangat kuat dan jelas di suatu masyarakat, sementara di masyarakat lain, hubungan tersebut bisa lemah atau tidak terlihat. Pola hubungan antara pendidikan dan politik kekuasaan di negara-negara berkembang dapat berbeda sesuai dengan pola yang dibentuk oleh kekuasaan yang ada. Dalam dunia pendidikan Islam, hubungan antara politik kekuasaan dan pendidikan memiliki keterkaitan yang jelas. Sejarah peradaban Islam ditandai oleh perhatian serius para ulama dan penguasa terhadap pendidikan untuk memperkuat posisi sosial-politik kelompok dan pengikut mereka. Penting diakui bahwa perkembangan pendidikan Islam sangat dipengaruhi oleh para penguasa, yang memerlukan dukungan dari lembaga pendidikan untuk melegitimasi dan mempertahankan kekuasaan mereka. Karena tujuan pemerintahan Islam adalah menerapkan kebenaran dan keadilan, yang tidak dapat dicapai tanpa pemahaman yang mendalam tentang syariat. Syariat tidak dapat ditegakkan tanpa masyarakat yang memahami syariat. (Haris Abdul, 2023).

H.A.R. Tilaar mengidentifikasi empat masalah yang terkait dengan implementasi kebijakan politik terhadap Pendidikan, antara lain:

- a. Domestikasi dan Stupidifikasi: Proses pendidikan di sekolah sering kali terlihat sebagai upaya untuk "menjinakan" individu dengan aturan yang ketat, yang dapat mengurangi kreativitas dan menghasilkan individu yang "bodoh" yang tunduk pada kekuasaan.

- b. Indoktrinasi: Pendidikan kadang-kadang melibatkan indoktrinasi, yang melibatkan penyampaian ilmu dengan cara yang dipaksakan tanpa memberikan kebebasan dalam pemilihan.
- c. Demokrasi pendidikan: Membicarakan demokrasi pendidikan berarti berbicara tentang kebebasan dalam pendidikan, di mana setiap orang memiliki hak untuk memilih. Meskipun demokrasi pendidikan telah diterapkan di Indonesia, implementasinya masih perlu diperbaiki
- d. Integrasi Sosial: Tidak selalu diperlukan kekuasaan untuk mencapai integrasi sosial. Pendidikan yang baik juga dapat menjadi sarana integrasi sosial yang efektif tanpa harus memaksa budaya lokal hilang. (Asriani, 2024).

Kebijakan politik Pendidikan Islam di Indonesia tidak lepas dari perjalanan Panjang terbentuknya bangsa Indonesia. Lembaga Pendidikan agama Islam memegang peranan penting dalam terbentuknya negara Indonesia. Oleh sebab itu dalam konstitusi negara sudah sangat Jelas tercantum nilai nilai Pendidikan Islam, seperti terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 4. Pancasila sebagai dasar negara dalam sila pertama jelas mencantumkan peran agama islam dalam pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. (Alexander Guci, Nurdin, 2024).

Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 tahun 2003 sebagai landasan operasional penyelenggaraan Pendidikan Nasional di Indonesia. Dengan landasan ini, status dan peranan Pendidikan Islam dalam konteks pendidikan nasional semakin kuat. Pada pasal 12 bagian (1) undang-undang Sistem Pendidikan Nasional memberikan penekanan hak pengajaran Pendidikan Islam kepada peserta didik dan diajarkan oleh guru dan diajarkan oleh guru agama yang sesuai dengan agama peserta didik. Untuk memenuhi hak pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, Pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, Pendidikan jasmani dan olah raga, keterampilan / kejuruaan dan muatan lokal. Ini berarti bahwa para guru Pendidikan Islam mempunyai landasan yang kuat untuk mengembangkan proses pengajaran Pendidikan Islam di sekolah. (Moch Jamilul Latif, Singgih Shodiqin, 2022).

Kedudukan Pendidikan Islam dari masa ke masa selalu mengalami pasang surut. Ini disebabkan perbedaan pandangan, gaya kepemimpinan dan orientasi kepemimpinan dari era orde lama, orde baru, hingga Reformasi pada masa sekarang. Kebijakan setiap Presiden Indonesia terkait Pendidikan Islam sangat mempengaruhi eksistensi Pendidikan islam dari masa ke masa. Hanya saja yang tidak dapat dipungkiri Pendidikan agama Islam secara fundamental menjadi pondasi dan identitas bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan Pancasila. (Frimayanti, 2022).

Al Quran menjelaskan kedudukan ilmu dalam seperti dalam surat Al-Mujadilah ayat 11  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ  
وَالَّذِينَ أَوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (المجادلة/58: 11)

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Di era reformasi dampak kebijakan politik terhadap Pendidikan Islam sangat mendukung dalam perkembangan Pendidikan Islam. Berikut beberapa kebijakan pendidikan Islam di era reformasi, antara lain :

- a. Desentralisasi Pendidikan. Otonomi daerah termasuk sektor Pendidikan memberikan kesempatan pada daerah untuk mengembangkan Pendidikan Islam sesuai dengan kebutuhan daerah.
- b. Pengakuan status Madrasah. UU no 20 tahun 2003 tentang sisdiknas menyamakan posisi madrasah dengan sekolah umum.
- c. Integrasi kurikulum umum dan keagamaan
- d. Perkuat dan penambahan Perguruan Tinggi keagamaan Islam Negeri (PTKIN)
- e. Dukungan dana BOS dan program beasiswa
- f. Dialog dan moderasi beragama. (Ramdanil Mubarak, 2021).

### **Tantangan dan peluang yang dihadapi Pendidikan islam dalam dinamika kebijakan politik saat ini.**

Tantangan globalisasi merupakan suatu kondisi kekinian sebagai akibat dari modernisasi. Kondisi tersebut harus dihadapi dan dilalui agar tercapai suatu keberhasilan. Tantangan tidak harus dimaknai sebagai sesuatu yang membuat sulit, atau kadang menghambat sesuatu yang ingin dicapai, tetapi tantangan adalah penggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah. Mastuhu mengemukakan, beberapa tantangan yang dihadapi dunia pendidikan masa kini, yaitu globalisasi, kompleksitas, turbulensi, dinamika, akselerasi, keberlanjutan dari yang kuno ke yang modern, koneksitas, konvergensi, konsolidasi, rasionalisme, paradoks global, dan kekuatan pemikiran. (Roswida Sri Astuti, 2023)

Selanjutnya, Rahim mengemukakan bahwa secara eksternal masa depan pendidikan Islam dipengaruhi oleh tiga isu besar, yaitu globalisasi, demokratisasi, dan liberalisme Islam. Daulay menyebut globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dekadensi moral sebagai tantangan pendidikan Islam masa kini dan masa depan. Sedangkan Wahid mengemukakan, tantangan pendidikan Islam yang harus dihadapi di era global ini adalah kebodohan, kebobrokan moral, dan hilangnya karakter muslim. Keempat pakar di atas berbeda dalam mengidentifikasi tantangan pendidikan Islam karena berbeda sudut pandang yang digunakan. Mastuhu melihatnya dalam perspektif perubahan sosial, Rahim mengamati menurut tinjauan politik, Daulay melihatnya dalam sudut pandang perkembangan iptek, dan Wahid melihatnya dari sudut pandang etika. (Roswida Sri Astuti, 2023).

Menurut Zubaedi ketika globalisasi dihadapkan dengan pendidikan Islam, maka muncul dua implikasi sekaligus, yakni peluang dan ancaman. Sebagai peluang, globalisasi di satu sisi akan memudahkan pendidikan Islam untuk mengakses berbagai informasi secara cepat, juga memudahkan pendidikan Islam untuk menyebarluaskan produk-produk keilmuan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya sebagai ancaman, ternyata globalisasi tidak hanya mempengaruhi tatanan kehidupan pada tataran makro, tetapi juga mengubah tata kehidupan pada level baru yang solutif dan antisipatif. mikro, yaitu terhadap ikatan kehidupan sosial masyarakat. (Sri Rahmawati, 2024). Peran ilmu agama diantaranya tercantum dalam Surat Al- Baqoroh ayat 2.

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (البقرة/2: 2)

Artinya :

Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan di dalamnya; (ia merupakan) petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa,

Adapun tantangan yang lainnya adalah implikasi yang lahir dari adanya ketiga tantangan utama tersebut.

- a. Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pendidikan Islam saat ini sedang ditantang konstribusinya terhadap pembentukan peradaban dan budaya modern yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks). Pada dimensi ini, pendidikan Islam mengalami kemunduran fungsi

- (degradasi fungsional) karena pendidikan Islam lebih berorientasi pada aspek moral spiritual. Diperlukan kemampuan adaptif Pendidikan Islam agar eksistensinya terjaga.
- b. Demokratisasi, Demokratisasi merupakan isu lain yang mempengaruhi pendidikan Islam Indonesia. Dede Rosyada menjelaskan, bahwa tuntutan demokratisasi pada awalnya ditujukan pada sistem politik negara sebagai antitesis terhadap sistem politik yang otoriter. Selanjutnya perkembangan tuntutan ini mengarah kepada sistem pengelolaan berbagai bidang termasuk bidang pendidikan. Kehidupan demokrasi adalah kehidupan yang menghargai akan potensi individu. Untuk itu Pendidikan Islam mesti terbuka terhadap perubahan dan responsive terhadap perubahan tersebut.
  - c. Dekadensi moral, Revolusi teknologi berakibat pada pergeseran nilai dan norma budaya. Pada lazimnya, nilai-nilai budaya dari pihak yang lebih dominan dalam penguasaan ipteks akan cenderung berposisi dominan pula dalam interaksi kultural yang terjadi. Dalam konteks ini, Hasbi Indra menjelaskan bahwa budaya Barat telah memperlihatkan superioritasnya terhadap budaya Islam. Produk teknologi seperti TV, parabola, telepon, VCD, DVD, internet, dan lain-lain dapat membuka hubungan dengan dunia luar sehingga wawasan masyarakat terbuka. Namun, lewat media tersebut dapat pula disaksikan pornografi, film-film, sinetron yang menawarkan gaya hidup bebas dan juga kekerasan, yang secara moral bertentangan dengan nilai Islam. Berdasarkan uraian di atas, jelas tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan dalam segala bentuk, baik bersifat personal maupun global bisa terjadi dalam hitungan waktu yang relatif sangat singkat. Hal ini merupakan tantangan yang mutlak dijawab oleh pendidikan Islam melalui strategi yang tepat. (Dince Putri Juita, Priya, Mayang Azwardi, 2024).

Tantangan Pendidikan Islam diatas jika dikelola dengan manajemen Pendidikan yang tepat dapat menjadi peluang Pendidikan Islam untuk dapat mengambil peran dalam membangun Pendidikan Nasional secara menyeluruh. Ancaman atau tantangan-tantangan globalisasi tak terelakkan lagi termasuk pada pendidikan Islam. Menurut Abdurahman Assegaf arus globalisasi bukanlah lawan maupun kawan bagi pendidikan Islam, melainkan sebagai dinamisator bagi mesin yang namanya pendidikan Islam. Bila pendidikan Islam mengambil posisi anti global maka akan tidak stationare atau macet dan pendidikan Islam pun mengalami intelektual shut down atau penutupan intelektual. Sebaliknya apabila pendidikan Islam terseret arus global dan kehilangan identitas ke Islamannya maka ia akan terlindas. Oleh karena itu berbagai problematika yang menjadi tantangan pendidikan Islam pada era globalisasi menuntut para pengelola lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan Islam melakukan nazhar atau perenungan dan penelitian kembali apa yang harus diperbuat dalam mengantisipasi fenomena tersebut, model pendidikan apa yang perlu ditawarkan di masa depan, yang sekiranya mampu mencegah atau mengatasi problema tersebut. (Nailil Maghfiroh, Atik Dwi Lestari, 2022).

## KESIMPULAN

Pendidikan Islam di era modern menghadapi tantangan besar karena perkembangan teknologi yang dapat merusak tatanan nilai-nilai, karakter kehidupan berbangsa dan bernegara. Ancaman sekulerisme, kekerasan, dan degradasi moral merupakan tantangan yang harus dihadapi bangsa Indonesia. Pendidikan Islam merupakan pilar penting dalam menghadapi tantangan tersebut dengan mengedepankan pembangunan karakter dan memperkuat nilai

nilai religiusitas.

Pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan tersebut mesti adaptif, transformatif dan partisipatif dalam membangun Pendidikan Islam di Indonesia. Pemanfaatan teknologi menjadikan Pendidikan Islam transformatif, lebih menarik, dan dapat diakses oleh semua masyarakat. Selain itu kebijakan pemerintah merupakan salah satu unsur yang memperkuat eksistensi Pendidikan Islam di Indonesia.

Berikut rekomendasi penulis hasil analisis perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia, antara lain :

- a. Pemerintah perlu memperkuat kelembagaan Pendidikan Islam seperti Madrasah dan Pesantren
- b. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan
- c. Akselerasi digitalisasi Pendidikan Islam
- d. Peningkatan anggaran Pendidikan Islam
- e. Kurikulum moderasi beragama dan penguatan karakter Islam
- f. Perkuat kolaborasi antara kementerian Agama dan kementerian Pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahdar dan Musyarif. (2022). *Tantangan Pendidikan Islam di Era Globalisasi*. 17.

Alexander Guci, Nurdin, A. (2024). *Tantangan pendidikan Islam di era Modern*. 3. no.2, 106–114.

Asriani, N. & A. (2024). *Tantangan Pendidikan Islam di Era Digital*. 3.

Dince Putri Juita, Priya, Mayang Azwardi, A. A. (2024). *Pentingnya pengembangan sumber daya manusia pada lembaga Pendidikan*. 5 No.4, 3068–3076.

Frimayanti, A. I. (2022). *Strategi Pendidikan Islam Menghadapi Problematika Globalisasi*. 3 No.4, 46–62.

Haris Abdul. (2023). *kebijakan kepemimpinan pendidikan Islam* (Rusli (ed.); Vol. 1). Perkumpulan Rumah Cemerlang.

Maemunah, Eni suhaeni, N. (2022). *DINAMIKA ISLAM DI INDONESIA: KEBIJAKAN POLITIK TERHADAP LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PASCA MERDEKA-REFORMASI*. 1 No.1, 1–11.

Moch Jamilul Latif, Singgih Shodiqin, A. M. B. K. P. (2022). *Pendidikan Agama Islam Dalam Mengatasi Degradasi Moral Sebagai Respon Perkembangan Era Disrupsi*. 7–1, 63–88.

Nadia Nurindah. (2024). *TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM : URGENSI DAN PRINSIP INOVASI PENDIDIKAN ISLAM*. 2 No. 3, 95–100.

Nailil Maghfiroh, Atik Dwi Lestari, F. (2022). *Politik Pendidikan Islam di Indonesia*. XVIII NO 3, 23–30.

Ramdanil Mubarak. (2021). *Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Pendidikan Islam*. 3 No.2, 131–146.



Roswida Sri Astuti, Q. K. (2023). *Tantangan Lokal Dan Global Kebijakan Politik Pendidikan Islam Di Indonesia*. 5 No. 2, 4570–4581.

Sri Rahmawati, J. (2024). *STRATEGI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI LEMBAGA PENDIDIKAN*. 5 No.4, 4321–4326.

Yudi Agung Franata, Andi Zainal Abidin, Kasful Anwar US, S. (2024). *Politik dan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia*. 2 No. 5, 284–296.

